



Jurnal  
**SUWA**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Malikussaleh

Vol. X, No.2 Agustus 2012

Alamat:

Universitas Malikussaleh  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26, Lhokseumawe  
Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia  
P.O. Box 141, Telp. (0645) 41373-40915, Fax. 44430



Terbit 6 kali setahun, sejak 2003

## Daftar Isi

<b>Bahasa, Wacana dan Media Massa sebagai Wahana Interaksi Sosial: Kajian Teoritis</b> <i>Dr. M. Nazaruddin</i>	101-108
<b>Birokrasi dalam Reformasi “Upaya-Upaya Internal Birokrasi dalam Pemberdayaan Aparatur Negara”</b> <i>Nur Hafni</i>	109-121
<b>Analisis Komunikasi Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Gampong Blang Crok Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara)</b> <i>Subhani, S.Sos., M.Si &amp; T. Alfiady, S.Sos., MSP</i>	123-142
<b>Perioritas Pembangunan Aceh</b> <i>TI Aisyah, S.Sos., MSP &amp; Mauludi, S.Sos., MSP</i>	143-157
<b>Adat, Syariat dan Peran Lembaga Adat dalam Masyarakat Aceh (Studi di Kabupaten Aceh Utara)</b> <i>Fajri M. Kasim</i>	159-177
<b>Konstruksi Perdebatan Regulasi Pilkada dalam Media Aceh: Analisis Pembingkai Berita di Harian Aceh</b> <i>Ahhammad Fazil</i>	179-199
<b>Menelusuri Asal Usul Manusia</b> <i>Ibrahim Chalid, S.Sos., M.Si</i>	201-210
<b>Riwayat Hidup Penulis</b>	212-213

## PERIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

Oleh : Ti Aisyah, S.Sos., MSP & Mauludi, S.Sos., MSP

### Abstrak

*Perioritas pembangunan perlu ditetapkan untuk memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang paling mendesak sehingga permasalahan publik dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan sasaran dan visi pembangunan diperlukan langkah-langkah dan strategi yang tepat. Pembangunan Aceh diupayakan secara menyeluruh dan terpadu baik dibidang ekonomi, sosial dan politik juga budaya.*

*Aceh dalam mengejar ketinggalan tidak hanya diraih dengan upaya yang bersifat rutin tapi juga untuk memantulkannya pembangunan dilakukan dengan terobosan-terobosan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. Pembangunan Aceh menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan semua aspek, ekonomi, sosial dan lingkungan.*

*Salah satu langkah strategis dalam pembangunan Aceh adalah membangun keunggulan lokal. Keunggulan lokal adalah kemampuan daerah memberikan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi sehingga tercipta pusat-pusat keunggulan kompetitif. Arah pembangunan Aceh ke depan harus memiliki kaidah people oriented development, yang berorientasi kepada pembangunan manusia dalam arti menjadikan manusia sebagai inti dari pembangunan itu sendiri.*

*Permasalahannya, Implementasi Kebijakan program-program pembangunan tidak maksimal dan lemahnya pengendalian serta pengawasan pemerintah terutama dibidang ekonomi sehingga hasil-hasil pembangunan tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Tingkat Kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dan belum dapat terlayangulangi di Aceh secara maksimal.*

## I PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses terencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Para pakar melihat pembangunan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi harus mampu menanggulangi permasalahan kemiskinan, pemerataan dan pengangguran. Maka indikator pembangunan harus dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam tiga unsur tersebut.

Tujuan Pembangunan Aceh harus diupayakan untuk memperkecil ketimpangan dan ketidak seimbangan antar sektor dan antar wilayah. Dasar pembangunan Aceh adalah dalam satu pola berpikir yaitu untuk mewujudkan visi misi dalam rangka terciptanya masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri serta bermartabat.

Masyarakat Aceh masih dililit kemiskinan, sebagaimana kita ketahui masyarakat miskin di Aceh pada tahun 2012 mencapai 1644 ribu jiwa, terdapat 235.485 KK masyarakat Aceh masih dililit kemiskinan, jumlah angkatan kerja mencapai 2.09 juta jiwa (BPS 2012). Dan ini merupakan PR bagi pemerintah, pengusaha dan masyarakat secara bersama-sama berkomitmen untuk menangannya melalui langkah-langkah nyata, prakarsa yang tinggi untuk merealisasi program-program perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah perlu menetapkan kebijakan-kebijakan yang mampu merealisasi seluruh program-program prioritas yang telah ditetapkan dan diperlukan tindakan-tindakan nyata serta komitmen semua pihak untuk proses pelaksanaan pembangunan tersebut secara sinergi, dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesional guna mewujudkan hasil pembangunan yang berkualitas. Dalam jangka menengah pemerintah Aceh harus mampu menggambarkan langkah-langkah dan target yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Aceh.

Permasalahan dan Isu strategis pembangunan Aceh, ada empat permasalahan utama yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target pembangunan diantaranya; masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah, terbatasnya lapangan kerja formal, rawan bencana dan perubahan iklim. Sedangkan isu strategis dan masalah mendesak dalam pembangunan Aceh adalah masih rendahnya tingkat ketahanan pangan, jumlah penduduk miskin masih tinggi, belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur dengan lintas bidang, dan rendahnya kualitas manusia serta masih rentannya terhadap post konflik, sosial, dan bencana, serta belum optimalnya penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan akuntabilitas, masih rendahnya produktivitas, serta belum optimalnya fungsional kawasan perdagangan, dan pelabuhan sabang serta belum tuntasnya kesinambungan rekonstruksi Aceh (tabungun Aceh, Mei 2011).

## II. Studi Pustaka

### II.1 Pengertian Pembangunan

Pengertian pembangunan. (development) mengandung arti multidimensional. Pembangunan sering diartikan pertumbuhan, pertambahan nilai dan penguatan. Para Pakar telah memberikan definisi pembangunan adalah suatu proses yang multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar untuk menuju modernitas dan kemajuan suatu bangsa dan negara.

Menurut SP, Siagian ada tujuh ide pokok yang terkandung dalam konsep pembangunan yaitu :

- Pembangunan merupakan suatu proses
- Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan
- Pembangunan dilakukan secara terencana
- Rencana pembangunan bermakna pertumbuhan dan perubahan
- Pembangunan mengarah kepada modernitas
- Modernitas dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan
- Semua hal yang dilakukan ditujukan pada usaha pembinaan bangsa.

Bahwa hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang akan terwujud apabila tercapainya kesejahteraan masyarakat lahir batin dan hidup yang layak dan terangkat dari kemiskinan dan keterpurukan. Dalam kerangka otonomi daerah setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk mengerjakan upaya yang optimal untuk membangun daerah masing-masing.

### II.2 Sasaran, visi dan misi Pembangunan Aceh

Pembangunan Propinsi Aceh Darussalam didasarkan pada visi dan misi yang telah disepakati dan ditetapkan dengan tujuan akan memberikan gambaran hasil yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penetapan program kegiatan pembangunan daerah Propinsi Aceh. Dalam pedoman strategi penanggulangan kemiskinan (PMBS: 2004) dijelaskan, Pemerintah Aceh telah menetapkan visi nya sebagai berikut : " Terwujudnya masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islami"

Misinya adalah : (1) Mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dalam semua aspek kehidupan masyarakat serta adat Aceh yang berjiwa Islami (2) Menciptakan tegaknya supremasi hukum dan hak azasi manusia

berlandaskan keadilan dan kebenaran yang bersifat menyeluruh (3) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (4) Meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan yang memiliki akhlakul karimah, iman dan taqwa.

Tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya masyarakat Aceh yang sejahtera baik moril maupun materil yang meliputi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum serta sejalan dengan kehidupan yang islami.

Salah satu langkah strategis dalam pembangunan Aceh adalah membangun keunggulan lokal. Keunggulan lokal adalah kemampuan daerah memberikan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi sehingga tercipta pusat-pusat keunggulan kompetitif. Arah pembangunan Aceh ke depan harus memiliki kaidah *people oriented development*, yang berorientasi kepada pembangunan manusia dalam arti menjadikan manusia sebagai inti dari pembangunan itu sendiri. Untuk implementasi konsep menjadikan manusia sebagai inti pembangunan Aceh dibutuhkan komitmen semua pihak terutama pemerintah, bekerja keras, semangat keikhlasan, demokratisasi, keadilan, keteladanan, akuntabilitas dan transparansi.

Rencana pembangunan Jangka Panjang Propinsi Aceh ) tahun 2005 – 2025 disusun sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan visi misi yang telah disepakati

"Pemerintah Aceh harus dapat bertindak sekaligus bersikap efisien dan efektif serta berprinsip menjalankan roda pemerintahan yang *good governance* yang bebas dari korupsi dan KKN dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak. Konsep pembangunan Nangroe Aceh Darussalam yang paling tepat dan sesuai dengan daerah syariat Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang makmur, yang jaya dan bermartabat".

Keimanan dan ketakwaan adalah Modal dasar dalam rangka implementasi pemerintahan yang *good governance*. Apa bila iman dan ketakwaan yang tipis dimiliki oleh masyarakat dan aparat pemerintah mutsahil pemerintahan yang *good governance* mampu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

Sedangkan Visi Pemerintahan Aceh periode Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf adalah " Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berlandaskan UCUA sebagai wujud MOU Helsinki". Sedangkan misi terjabarkan sebagai berikut :

- Memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah

- Menetapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai dimul Islam disemua sektor kehidupan masyarakat.
- Memperkuat struktur ekonomi dengan kualitas SDM.
- Mewujudkan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.

### III. Perioritas Pembangunan Aceh

1. Perioritas pembangunan Aceh (2004) Pasca konflik dan bencana Tsunami telah menetapkan beberapa kebijakan program percepatan pemulihan kondisi daerah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, yang dalam pelaksanaannya diarahkan dan mengacu pada penanganan program-program prioritas.

Adapun program-program kegiatan sebagai berikut :

- 1). Program perluasan kesempatan
  - Memfungsikan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif baik untuk tanaman sayuran maupun tanaman multikultura
  - Pemanfaatan kebun rakyat untuk meningkatkan produktifitas dan peningkatan pendapatan petani
- 2). Program Pemberdayaan Masyarakat
  - Penyempurnaan infrastruktur yang sudah dibangun dan belum berfungsi secara optimal
  - Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana
  - Bantuan modal dan bunga rendah kepada masyarakat (pengusaha kecil dan menengah dan koperasi).
  - Meningkatkan dan mengembangkan usaha pemasaran
- 3). Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia
  - Pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin sesuai dengan jenis usaha dan keterampilan yang ditekuni
  - Melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada lembaga keuangan gampong yang berkembang dan berprestasi.
- 4). Program Perlindungan Sosial
  - Pembangunan kembali sarana perumahan bagi masyarakat miskin khususnya masyarakat korban konflik dan korban tsunami
  - Bantuan beras untuk masyarakat miskin

Bantuan kesehatan bagi keluarga yang terkena dampak konflik dan tsunami dan rehabilitasi sosial ekonomi

2. Revisi Tahun 2007 (Bappeda:2007) agenda utama program dan kegiatan-kegiatan pembangunan sampai tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan diarahkan dalam rangka menangani permasalahan-permasalahan

- Krisis ekonomi dan keamanan
- Kualitas Sumber Daya Manusia dan kesehatan
- Kesejahteraan sosial masyarakat
- Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi
- Kesenjangan pembangunan
- Prasarana dan sarana
- Pelaksanaan syariat Islam
- Pemberdayaan perempuan
- Pelaksanaan otonomi Daerah dan otonomi khusus

2. Agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai yang diarahkan pada pencapaian 3 sasaran pokok : (1) meningkatkan rasa aman dan damai. (2) meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. (3) Meningkatkan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Dengan prioritas pembangunan diletakkan pada :

- Peningkatan rasa saling percaya dan tercipta harmonisasi dalam pergaulan hidup masyarakat
- Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur
- Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas
- Pencegahan dan penanggulangan separatisme dan gerakan separatisme
- Peningkatan kemampuan pertahanan negara
- Pemantapan politik luar negeridan peningkatan kerjasama internasional

### C. Agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis

Prioritas pembangunan diarahkan pada :

- Pembentukan sistem dan politik hukum
- Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk
- Penghormatan, pengakuan dan penegakan azas hukum dan hak azasi manusia

- Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
- Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah
- Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa
- Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat  
Kegiatan pembangunan diarahkan pada :

- Penanggulangan kemiskinan
- Pemberdayaan koperasi dan usaha makro, kecil dan menengah
- Peningkatan daya saing industri manufaktur
- Revitalisasi pertanian
- Pembangunan bidang pertanian
- Pembangunan bidang kelautan dan perikanan
- Peningkatan investasi dan ekspor daerah
- Peningkatan pengelolaan BUMD
- Pemantapan stabilitas ekonomi makro
- Perbaikan iklim ketenagakerjaan
- Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Pembangunan pedesaan
- Pengurangan kelimpangan pembangunan wilayah
- Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas
- Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
- Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga
- Peningkatan kualitas kehidupan beragama
- Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup

4. Prioritas RPJM Aceh Tahun 2007 -2012

Sebagaimana tertuang dalam Visi Misi RPJM Aceh tahun 2007-2012, Aceh telah menetapkan 7 prioritas pembangunan Aceh yaitu :

- a. Penguatan pemerintahan, politik dan hukum
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung investasi
- d. Pembangunan pendidikan yang bermutu dan merata
- e. Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas
- f. Pembangunan agama sosial dan budaya
- g. Penanganan dan pengurangan resiko bencana

#### 5. Prioritas Pembangunan Aceh Masa Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf

Dalam rangka mewujudkan visi, pemerintahan Aceh telah menetapkan

10 prioritas pada tahun 2013 yaitu :

- a. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah Aceh
- b. Keberlanjutan perdamaian
- c. Dinul Islam
- d. Sosial
- e. Adat istiadat
- f. Ketahanan Pangan
- g. Penanggulangan kemiskinan
- h. Pendidikan
- i. Kesehatan
- j. Infrastruktur

#### IV. Pembangunan Bidang Ekonomi

Kemasan Kegiatan pemerintah Aceh dan program-program pembangunan dilakukan melalui kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Kewenangan yang besar ini tentunya memiliki implikasi bagi pemerintah Aceh untuk melakukan serangkaian kegiatan pembangunan sampai ke gampong-gampong tentunya harus didukung oleh sumberdaya manusia, keuangan, masyarakat lokal dan pemerintah Aceh sendiri. Implikasi yang tidak kalah pentingnya dari pengurusan kewenangan tersebut dengan semakin meningkatnya kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Aceh sesuai dengan prioritas dalam RPJM 2007-2012 terkait dengan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, pembangunan ekonomi, Bappeda Aceh pada tahun 2011 telah menetapkan empat prioritas pembangunan bidang ekonomi Aceh yaitu :

- (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimaksudkan meliputi progrowth, pro-poor, dan pro-job, dengan demikian target pertumbuhan tersebut diharapkan sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskina, pengangguran melalui pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, mendorong terciptanya lapangan kerja, dan kemudahan usaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan fokus sasaran masyarakat di pedesaan.
- (2) Tingkat pengangguran, tingkat pengangguran di Aceh pada tahun 2011 dapat ditekan menjadi 8,0 persen

- (3) Tingkat Kemiskinan; jumlah penduduk miskin di Aceh diharapkan menjadi 18 persen dari total penduduk Aceh
- (4) Tingkat Inflasi, ditargetkan pada tahun 2011 hanya 3,0 persen.

Menurut Bastian (Tabangun Aceh, 13 Mei 2011), dalam rangka mewujudkan sasaran utama dari periotas pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan tersebut perlu ditempuh melalui beberapa kebijakan yaitu peningkatan produksi pertanian dan perikanan; pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana ekonomi publik, penguatan sistem penyuluhan pertanian, serta kelembagaan petani dan nelayan, peningkatan kompetensi kerja, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta perkoperasian.

Evaluasi dari ekonom, pada masa pemerintahan Irwandi, Aceh belum memiliki program dan arah yang jelas dalam sektor pembangunan ekonomi. Para pengamat menilai bahwa kegiatan pemerintah Aceh yang memburu investor dan menandatangani sejumlah MOU tidak akan membawa kecerahan ekonomi Aceh apabila tidak ada realisasi semua usaha menjadi sia-sia. Pemerintah Aceh dalam hal ini harus lebih memfokuskan pada kegiatan pembenahan ke dalam diantaranya birokrasi, aturan perizinan, infrastruktur dasar dan energi listrik.

Apabila empat hal ini sudah memadai di Aceh maka perhatian investor akan terpusat ke Aceh karena mereka membutuhkan jaminan keamanan investasi yang akan ditanam di Aceh. Apabila persoalan ini tidak ditangani dengan serius akan menjadi penghambat bagi investor untuk menanamkan modalnya di Aceh.

Apapun kebijakan yang akan dilakukan oleh Zaini Abdullah pada masa pemerintahannya dalam memajukan perekonomian Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan.

#### V. Pembangunan Pendidikan

Sumber Daya Manusia merupakan titik sentral yang sangat penting untuk pengembangan dan kemajuan suatu bangsa. SDM yang berkualitas tentunya memiliki penguasaan kemampuan yang tinggi baik dibidang teknologi dan pengetahuan yang akhirnya melahirkan kualitas kinerja dan prestasi seseorang.

Peran dunia pendidikan sangat menentukan dalam melahirkan SDM yang baik dan profesional. Lembaga pendidikan di Aceh harus bangkit dan berbenah diri untuk melakukan perubahan sehingga pendidikan di Aceh semakin baik dan bermutu melalui sejumlah kebijakan- kebijakan yang perlu dicanangkan dan kemampuan mengaplikasikan dari setiap kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Mutu pendidikan di Aceh ke depan harus mampu

ditingkatkan dengan membangkitkan iklim reformasi, inovasi yang holistik dan terpadu pada setiap tingkatan yang mampu melahirkan SDM yang berdaya saing.

Namun Kondisi riil pendidikan Aceh selama ini kualitasnya sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain, rendahnya mutu pendidikan di Aceh bukan semata-mata disebabkan oleh minimnya anggaran bidang pendidikan yang belum mencapai 30 % sebagai yang diamanatkan dalam UUPA, tapi lebih disebabkan penggunaan anggaran pendidikan yang belum tepat sasaran, disamping masih rendahnya mutu guru. Masih banyak anggaran pendidikan yang tidak diperuntukkan untuk peningkatan mutu. Dalam APBA 2013 hasil revisi dari Mendagri alokasi dana pendidikan sudah terpenuhi 20 % menjadi pertanyaan kita bersama dengan alokasi dana 20 % tersebut mampukah mutu pendidikan Aceh dapat terangkat secara signifikan? Kebijakan UN 2013 dapatkah meningkatkan mutu lulusan mencapai standar nasional yang lebih baik? Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakkir Manaf mengharapkan pelaksanaan UN harus sukses karena menjadi barometer pelaksanaan pendidikan. Dan tak berlebihan jika mengharapkan dengan alokasi dana pendidikan APBA 2013 yang sudah terpenuhi 20 %, kualitas pendidikan Aceh bisa lebih baik.

Namun menurut Tanwir (Kiprah Pendidikan, 2013) Kemerossotan mutu pendidikan di Aceh lebih disebabkan penggunaan dana pendidikan lebih cenderung kepada pembangunan fisik, biaya perjalanan dinas dan honor-honor kegiatan, belum menyentuh pada substansi pada peningkatan mutu guru. Mutu guru di Aceh masih sangat rendah, sebagai barometer dapat kita lihat dari hasil uji kompetensi guru tingkat nasional, kualitas guru dari Aceh berada pada tingkat 28 ini sangat memprihatinkan". Yusuf Azis (Dakan Fisip Unsyiah) juga menyatakan hal yang sama bahwa rendahnya mutu pendidikan di Aceh adalah penyebabnya rendahnya mutu guru. Rekrutmen guru di Aceh bukanlah yang terbaik. (Kiprah Pendidikan, 2013). Namun menurut penulis pembangunan sarana fisik untuk pembelajaran itu juga sangat penting untuk peningkatan mutu pendidikan, karena mustahil pembelajaran bisa berlangsung maksimal dengan ruang kuliah / ruang kelas yang tidak representatif/tidak layak/tidak nyaman, juga diperlukan ruang untuk perpustakaan dan laboratorium. Yang perlu penekanan adalah dana untuk pembangunan fisik tsb dialokasikan dengan rasional dan dapat digunakan tepat sasaran dan capaian target yang maksimal tidak diselewengkan.

Persoalan lain dari rendahnya mutu pendidikan adalah masih banyak masyarakat Aceh yang masih buta aksara, berdasarkan Standar Nasional mutu lulusan UN di Aceh masih dibawah standar rata - rata nasional. Manajemen yang belum bagus. Barometer lain yang dapat dilihat, Mutu pendidikan Aceh masih sangat tertinggal buktinya masih banyak lulusan SMA yang tidak jebol diperguruan Tinggi Negeri (Perguruan Tinggi favorit), dan masih banyak lulusan perguruan tinggi yang profesionalnya masih kurang dan

mutunya lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain sehingga kurang akses dalam persaingan dunia kerja. Masih banyak lulusan sarjana yang menganggur belum tertampung di dunia kerja dan belum mampu berkarya dalam wirausaha mengingat keterbatasan lapangan kerja yang tersedia. Pembecnanan manajemen pendidikan di Aceh merupakan langkah yang paling mendesak untuk dilakukan. karena apabila dengan manajemen dan sistem birokrasi yang selama ini dijalankan akan sulit mendobrak ketertinggalan mutu pendidikan di Aceh. Masyarakat Aceh harus memiliki SDM yang baik.

Menurut Prof.Samsul Rizal (Kiprah Pendidikan, Maret 2013), rendahnya mutu lulusan UN disebabkan saat ini masih ada kurikulum yang salah dan masih banyak yang perlu diperbaiki, masih diperlukan kesadaran para guru untuk memperbaiki kapasitasnya, dan beberapa mata pelajaran yang masih kekurangan guru, guru banyak menumpuk pada satu bidang

Dana pendidikan penggunaannya harus lebih terarah diantaranya dapat difokuskan untuk peningkatan mutu pendidikan dan mutu pendidik serta mutu anak didik melalui pemberian bea siswa pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya (dosen) , sehingga guru / dosen lebih bisa memfokuskan diri mendidik anak didik. Guru-guru dan dosen perlu diberikan fasilitas untuk melanjutkan pendidikan tidak hanya dengan penataran dan pelatihan, karena penataran dan pelatihan yang selama ini diikuti guru / pendidik tidak banyak memberi pencerahan terhadap mutu pendidikan, dan memberi peningkatan terhadap mutu SDM guru/dosen / pendidik lainnya.

Pembangunan dengan paradigma baru, diperlukan pembangunan dunia pendidikan sebagai gerakan sosial dibidang intelektual. Menempatkan manusia sebagai inti dari pembangunan, dengan demikian masyarakat di propinsi Aceh harus dapat dijadikan sebagai inti dari pelaksanaan pembangunan Aceh ke depan, mampu bertindak sebagai subjek pembangunan.

Melalui proses kemajuan pendidikan diupayakan masyarakat Aceh dapat bangkit dan mampu meningkatkan keadilan, bermartabat, dan memiliki intelektual yang tinggi.

Menurut Hadi (2007) "Aceh harus dibangun dalam suatu konsep "transformasi total" dan hal utama dan yang pertama harus dibangun adalah dengan melalui proses transformasi fondasi yang kokoh dan religius. Membangun kesadaran kolektif generasi muda Aceh yang bersandar pada nilai-nilai kultural yang religius yang berlandaskan pada *education and trade*. Pengembangan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan langkah utama untuk transformasi yang secara bersamaan.

Menindak lanjuti setiap gerakan pembangunan baik bidang pendidikan dan lainnya, dapat kita cerna dari kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh sekarang dan masa yang akan datang. Dalam hal ini kita coba memperhatikan kebijakan - kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah Zaini Abdulah diantaranya melalui prioritas alokasi anggaran apakah untuk bidang pendidikan sudah

memenuhi 20 % sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang/UUPA dan bidang lainnya yang langsung menyentuh kebutuhan publik seperti kesehatan. APBA 2013 sebesar 9,5 triliun diprioritaskan untuk bidang pembukaan lapangan kerja baru, pendidikan, kesehatan dan pembangunan fisik. Untuk bidang pendidikan pemerintah Aceh telah memplotkan anggaran sebesar 1,5 triliun, namun dari hasil evaluasi kementerian alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan belum mencapai 20 % dan menyimpang dengan undang-undang, dan diperlakukan perbaikan APBA. Hasil evaluasi Mendagri terhadap APBA 2013 bernilai RP. 11.785 triliun. Dan telah selesai dilakukan perbaikan pada tanggal 4 Maret 2013, sebagaimana penjelasan Ketua DPRA (Hasbi Abdullah) 6 Maret 2013).

Penjelasan Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRA (Ermiadi, 6 Maret 2013), koreksi Mendagri terhadap APBA 2013 telah diselesaikan diantaranya untuk alokasi dana pendidikan pada awalnya menurut penilaian Mendagri baru memenuhi 18,37 persen (sebesar 2.164 triliun dari Pagu APBA 11.785 Triliun), sudah terpenuhi 20 % yang kekurangan dana tersebut dialihkan dari dana hibah/bantuan sosial, demikian juga dengan alokasi dana kesehatan yang hasil penilaian Mendagri baru memenuhi 9,42 persen (1.065 triliun dari total APBA 11.785 triliun) telah dipenuhi 10 %. Serta untuk belanja modal yang awalnya hanya memenuhi 22 persen telah dipenuhi sebesar 29 persen. Kita harapkan seluruh pilak dapat merealisasikan seluruh kegiatan pembangunan dan pemerintah mampu meningkatkan pengawasan pembangunan.

## VI. Pembangunan Sosial dan Budaya/adat istiadat

Keberhasilan pembangunan sangat tergantung kepada ada atau tidak adanya partisipasi masyarakat karena paradigma pembangunan sekarang masyarakat adalah subjek pembangunan. Nilai-nilai modern dan progresif budaya masyarakat adalah merupakan penunjang pembangunan. Masalah sosial, budaya/adat istiadat yang harus diperhatikan agar dapat menunjang pembangunan.

Pembangunan sosial, adat istiadat di Aceh, dan Dinul Islam menjadi salah satu program prioritas pada masa pemerintahan Zaini Abdullah. Melalui program-program tersebut Aceh dapat membangun dan melakukan perubahan melalui pembangunan sosial dan budaya yang berkarakter Islami (tabungun Aceh, Mei 2011).

Propinsi Aceh adalah salah satu propinsi yang masih tinggi problem pembangunan. Diantaranya:

- (1) Problem pembangunan budaya juga tidak kalah penting. Budaya Islami sudah memudar dalam kehidupan masyarakat Aceh, Adat Istiadat daerah Istimewa Aceh sudah terkontaminasi dengan budaya barat. Membangun karakter masyarakat yang Islami menuai begitu banyak tantangan. Untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara qaffah di Aceh masih banyak persoalan, pergaulan sosial masyarakat masih

jauh dari Islami (seks bebas masih menjadi masalah). terutama masalah pergaulan bebas para generasi muda, generasi tua juga menjadi masalah. Masih banyak muda mudi dan masyarakat lainnya yang pergaulannya masih jauh dari nilai nilai Islami "seks bebas masih menjadi problem di Aceh", (Serambi, 5 Maret 2013). diperlukan pemikiran dan penanganan yang serius dari pemerintah untuk mengantisipasi agar budaya seks bebas dapat segera teratasi.

Tanggung jawab sosial masyarakat sekarang sudah berkurang, kontrol rumah tangga/orang tua terhadap anak, muda mudi sudah berkurang, para kaum dewasa tanggung jawab sosial dan kontrol perilaku yang sesuai nilai Islami sudah memudar, masih lemah nilai kontrol pemerintah, inilah sebagian tantangan besar yang harus disikapi, menjadi perhatian, penanganan tindakan tegas dari pemerintah dan semua pihak,imana tantangan yang harus dihadapi pemerintah Aceh masih diperlukan pemikiran dan penanganan yang serius, diantaranya pergaulan generasi muda dan tua diperlukan pemikiran serius pemerintah untuk penanganannya.

- (2) Problema pembangunan sosial salah satunya adalah tingginya angka kemiskinan. Persoalan pembangunan sosial yang menjadi salah satu agenda penting adalah penanganan penanggulangan kemiskinan. Tingginya angka pengangguran.

Pemerintah Aceh selama ini telah menyusun strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang terpadu, dengan sasarannya pengusaha kecil dan menengah, koperasi, dan lembaga keuangan gampong dalam berbagai jenis usaha ke arah yang profesional dan berdaya saing dengan memberikan pembinaan dan kemudahan pada masing-masing bidang usaha serta menciptakan sistem usaha yang kondusif. Mengembangkan sistem kebutuhan pangan yang berbasis pada komoditi unggulan daerah dan meningkatkan pendapatan para petani dan nelayan.

Persoalan mendasar selama ini adalah upaya penanggulangan kemiskinan belum dapat mengentaskan kemiskinan secara signifikan, dan ini didasari pada tiga kelemahan yaitu:

- Pemahaman yang salah tentang konsep pemberdayaan itu sendiri di mana fenomena aplikatif dari konsep pemberdayaan masyarakat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
- Fungsi pemerintah dalam membangun motivasi publik dalam program pemberdayaan belum maksimal, sehingga masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Masyarakat belum mandiri dalam pelaksanaan program masih membutuhkan pendampingan.

- Fungsi koordinasi pemerintah dengan pihak NGO / Swasta belum berjalan maksimal, sehingga terjadinya tumpang tindih program penanggulangan kemiskinan.

## VII. Kesimpulan

- Pembangunan Aceh diarahkan pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri.
- Aceh dalam usaha percepatan pembangunan mengutamakan program-program prioritas dalam upaya meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Implementasi pembangunan Aceh dalam pencapaian target belum terealisasi secara maksimal setiap tahunnya, ini terlihat dari adanya SIPA anggaran setiap tahunnya. Diperlukan peningkatan pengendalian dan pengawasan pada semua program yang telah dianggarkan. Dan masih banyak penggunaan dana yang belum tepat sasaran, seperti dana pendidikan belum menyentuh pada substansi kebutuhan pokok peningkatan mutu pendidikan terutama mutu guru.
- Secara umum skala prioritas anggaran pembangunan setiap tahun adalah pada bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan peningkatan perekonomian masyarakat, belanja modal, hibah. Sosial budaya dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Abdul Hadi, 2007, Keynote Speech, Makalah, Konferensi Internasional Pembangunan Aceh ke-2, Universitas Malikussaleh Aceh.
- Badan Statistik, Aceh Dalam Angka, Tahun 2012
- Kiprah Pendidikan, Maret 2013
- PMB5 (2004), Pedoman Strategi enanggulangan kemiskinan (Depdagri)
- Rizal, Samsul, Kiprah Pendidikan, Maret 2013
- Sekwilda Aceh, 1989, Sepuluh Terobosan Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
- Siagian, Sondang P, 2003, Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi Dan Strateginya, Jakarta, Bumi Aksara.
- Tabloid, Tabangun Aceh, 13 Mei 2011
- Serambi Indonesia, 5 Maret 2013.
- Serambi Indonesia, 6 Maret 2013
- Tabloid, Tabangun Aceh, 13 Mei 2011
- Undang-Undang RI No. 11, 2006, Tentang Pemerintahan Aceh, Jakarta, CV Tamita Utama

OOOOO